



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI DALAM RANGKA
PROGRAM LEGISLASI PENYUSUNAN RUU MIGAS
KE LAPANGAN GAS TOTAL EP DI SENIPAH, HANDIL KUTAI KERTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2017-2018

30 November Sampai Dengan 2 Desember 2017

**SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2017

BAB I

PENGANTAR

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, mengingat minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Untuk itu pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efektif, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberikan manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Negara telah membentuk Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi maka kemudian diterbitkan UU No 22 Tahun 2001.

Ternyata UU No 22 Tahun 2001 dalam pelaksanaannya digugat ke Mahkamah Konstitusi karena beberapa pasal dinilai bertentangan dengan UUD 1945 diantaranya Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU No 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu DPR RI mengambil inisiatif melakukan an revisi UU No 22 Tahun 2001 menjadi program legislasi nasional. Sampai saat ini RUU Migas sudah berada di Badan Legislatif.

Untuk mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan di sector migas maka dalam rangka percepatan kegiatan legislasi di Komisi VII perlu melakukan peninjauan lapangan, salah satu yang ditinjau adalah Lapangan Gas Total EP di Senipah, Handil, Kutai Kertanegara. Lapangan Gas ini pada tanggal 31 Desember 2017 kontraknya akan berakhir.

Lapangan Gas ini dikelola oleh Total E&P Indonesia. Sebagai [Kontraktor Kontrak Kerja Sama](#) (KKKS) [SKKMIGAS](#), **Total E&P Indonesia** memproduksi migas dari lapangan Bekapai, Handil, Tunu dan Peciko yang berada di wilayah [Kabupaten Kutai Kartanegara](#), [Kalimantan Timur](#). Total menyuplai 80 persen kebutuhan gas kilang LNG Bontang dengan produksi 1.761 Bcf/d dan 67.600 BOD untuk minyak dan kondensat.

Data terakhir Blok Mahakam, realisasi produksi gasnya hingga Juni 2017 sebesar 1.504 MMscfd atau 105% dari target 1.430 MMscfd. Blok Mahakam berkontribusi sebesar 20% terhadap produksi gas nasional yang menyentuh 7.512 MMscfd. Realisasi produksi minyak dan kondensat sebesar 55.100 barel per hari (bph) atau lebih tinggi 103% dari target 53.600 bph

Terkait dengan akan berakhirnya kontrak kerjasama Total E&P dengan Pemerintah pada 31 Desember 2017, Total E&P Indonesia masih berminat untuk memiliki saham partisipasi di blok minyak dan gas bumi di delta Mahakam, namun Pemerintah menolak usulan Total E&P. Mulai 1 Januari 2018, PT Pertamina (Persero) ditunjuk menjadi operator Blok Mahakam.

Dalam rangka menjaga kesinambungan operasi dan kelangsungan produksi, Pertamina apabila dipandang perlu dapat bermitra dengan Kontraktor Existing (diusulkan maksimal sebesar 30%) dan/atau BUMD (maksimal sebesar 10%) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang daerah administrasinya meliputi WK Mahakam dengan kepemilikan sahamnya 100%.

Guna memperlancar proses alih kelola WK Mahakam pasca 2017, SKK Migas memfasilitasi, mengkoordinasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk tapi tidak terbatas pada peralihan data, aset, sumber daya manusia, dan pemberian persetujuan yang diperlukan.

Oleh karena itu sebagai bagian dari suatu solusi percepatan penyelesaian RUU Migas Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan lapangan guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dan para pelaku ekonomi khususnya yang bergerak di sektor migas sehingga diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan migas yang terjadi di tanah air. Selain itu untuk memperkaya isu – isu terkait rencana revisi UU Migas yang masuk dalam program legislasi tahun 2017.

II. DASAR HUKUM.

Dasar Hukum dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 20 November 2017 tentang Agenda agenda kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke Lapangan Gas Total EP di Senipah, Handil, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur adalah untuk menyerap aspirasi berbagai pemengku kepentingan sektor migas khususnya dari Pertamina dan Pemerintah Daerah guna mempercepat terselesaikannya RUU Mineral dan Batubara.

IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Senipah, Handil, Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah tanggal 30 November 2017 sampai dengan 2 Desember 2017. Dengan agenda pertemuan dengan seluruh jajaran pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara, Kapolda serta unsur terkait lainnya

V. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk memperoleh masukan dan informasi terkini tentang kondisi perusahaan migas guna mengakselerasi penyelesaian RUU Migas dalam program legislasi nasional tahun 2018.

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa memperkaya khasanah sehingga RUU Migas yang kelak akan menjadi Undang-undang sektor Migas lebih sempurna dalam implementasinya.

VI. SUSUNAN ANGGOTA TIM KUNJUNGAN SPESIFIK

Anggota kunjungan spesifik adalah Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi di Komisi VII DPR RI (terlampir)

BAB II

KUNJUNGAN KE LAPANGAN

2.1. Kunjungan ke Total E&P Indonesia, Senipah

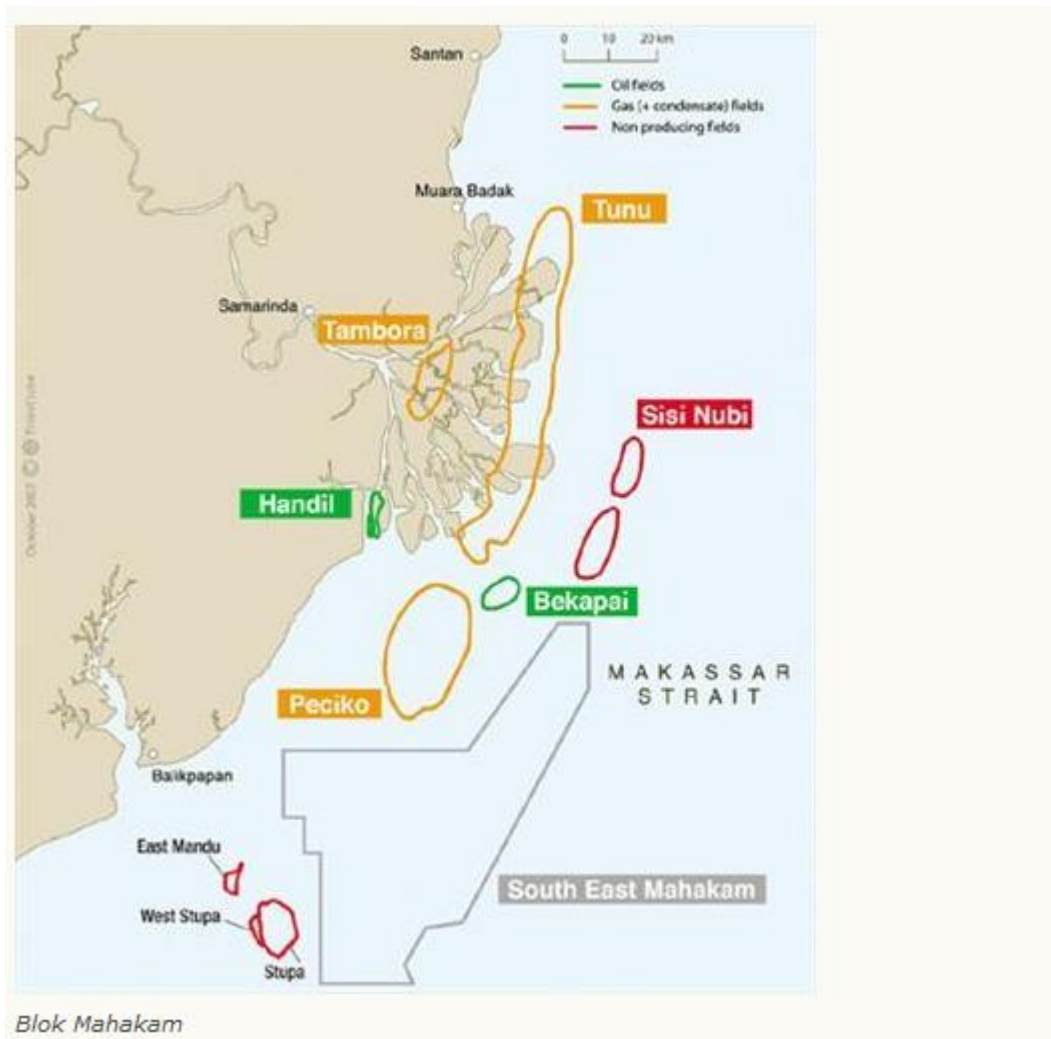
2.1.1. Profil Total E&P Indonesia

Kegiatan *Production Sharing Contract* Blok Mahakam dan Tengah yang dilakukan oleh Total Indonesia E&P menggandeng mitra kerja Inpex, sebuah perusahaan Jepang. Untuk Blok Mahakam Inpex memiliki 50% saham. Sedangkan untuk blok Tengah Inpex menguasai 22,5% saham, Pertamina Hulu Energy 50% saham, dan IP 5% saham.

Jumlah sumur yang ada sebanyak 2.143 sedangkan sumur yang berproduksi 695. Luas wilayah kerja KKKS Total Indonesia 2.738,51 Km². Produksi pertama dari Lapangan Bekapai pada tahun 1974. Produksi actual per Desember 2016 untuk gas 1,635 MMscfd (gas) inlet, sedangkan untuk minyak 63.877 BPOD. Produksi sesuai *work plan and budget* untuk gas sebesar 1.430 MMscfd dan untuk minyak 53.340 BOPD. Produksi sesuai revisi *work plan and budget* untuk gas sebesar 1.309 MMscfd dan untuk minyak 51.203 BBOPD.

Blok Mahakam merupakan wilayah pengoperasian migas yang kompleks dan berukuran besar, serta memiliki peran besar dalam produksi hulu. tak mudah mendapatkan gas bumi dari Blok Mahakam. Blok ini berada di lepas pantai dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Sumur-sumurnya juga sudah tua, karena Blok Mahakam sudah beroperasi sejak 1967 atau 49 tahun lalu. Di tengah harga minyak yang sedang rendah seperti saat ini, keunggulan operasional amat penting dalam pengelolaan Blok Mahakam. Sebab, cadangan minyak dan gas

di sumur-sumur Blok Mahakam semakin menurun, operasinya juga makin rumit dan kompleks.



Peta Lokasi Blok Mahakam

Blok Mahakam pertama kali memproduksi minyak tahun 1974 dari lapangan Bekapai. Hingga tahun 2016 jumlah sumur yang dibor lebih dari 2000 sumur. Hanya 700 sumur yang masih aktif. Total Indonesia EP memiliki kemampuan memproses gas sebesar 3.000 MMSCFD dengan 6 lapangan produksi. Total Indonesia EP saat ini memiliki pegawai 3.403 orang dengan biaya operasi US\$ 900 juta. Total Indonesia EP memasok lebih dari 80% LNP untuk Bontang Plant. Suplai gas nasional 36% dari

Total Indonesia EP. Puncak produksi minyak Total EP Indonesia pada tahun 1975 sedangkan gas pada tahun 2004.

Produksi Minyak & Gas

	Real 2015	Real 2016	WP&B 2017revised
Produksi			
Gas (MMscfd)	1.689	1.635	1.309
Minyak (KBOPD)	69,9	63,9	51,2
Harga			
Gas (MMBTU)	US\$ 8,26	US\$ 5,97	US\$ 5,99
Minyak (BBL)	US\$ 51	US\$ 41,85	US\$ 51,49
Penerimaan Negara US\$	2,5 Milyar	1,8 milyar	1,6 milyar

2.1.2. Persiapan Alih Kelola

Pemerintah berkepentingan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasama produksi dengan Total EP Indonesia. Untuk melakukan tindakan tersebut, Pemerintah cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan regulasi yang mengatur pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang berakhir kontrak kerjasamanya melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015.

Langkah lanjutan yang dilakukan adalah Menteri ESDM mengeluarkan surat dengan nomor surat No.8484/13/DJM.E./2015 tertanggal 2 Juli 2016 yang ditujukan kepada Total EP Indonesia. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Kontrak WK Maakam dengan Total tidak diperpanjang, dan Pertamina (Pertamina Hulu Energi) ditunjuk sebagai operator setelah WK Mahakam Total berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Pemerintah Indonesia meminta Total EP Indonesia tetap memberikan dukungan terkait alih kelola agar level produksi setelah 2017 dapat tetap terjaga oleh operator baru. Transfer of Mahakam Operatorship dan Tim Persiapan Pengelolaan WK Mahakam (TPPM) dibentuk masing-masing di Total EP Indonesia dan Pertamina

Hulu Energi. Tujuan dibentuknya TPPM adalah untuk koordinasi dan komunikasi guna merumuskan, melaksanakan, dan memonitor program kerjasama untuk tujuan transfer yang lancar, menjaga kelancaran & keselamatan operasi, serta menjaga tingkat produksi yang diharapkan.

Dalam operator activities transfer plan menyebutkan 15 item yang dibahas yaitu:

- HSSEQ/K3LL
- Manajemen Asset
- Tenaga Kerja
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Supply Chain Management
- Perijinan
- Intellectual Property Right and Referential
- Keuangan, Pajak dan Asuransi
- Study (Subsurface & Development Planning)
- Work Program and Budget
- Project
- Field Operation
- Drilling and Well Intervention
- Land, Sea, and Air Transportation
- Transfer of Other Related Entities

Aspek utama dari transfer operation yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Ketenagakerjaan – ini menyangkut 98% karyawan Total EP Indonesia yang akan beralih menjadi karyawan Pertamina Hulu Energi per 1 Januari 2018. Organisasi PHM pada 1 Januari 2018 sudah disepakati bersama. Tidak ada perubahan atas surat perjanjian pekerjaan pada 1 Januari 2018.
2. Asset mencakup tanah, HBM/HBI, dan material persediaan. Dilakukan pemeriksaan fisik asset Barang Milik Negara sudah selesai dilakukan untuk Material Persediaan dan Tanah. Berita acara pemeriksaan fisik asset tetap BMN dilakukannya akhir Nopember 2017. Berita serah terima sebelum 31 Desember 2017. Skema serah terima asset: Total EP Indonesia menyerahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas kemudian

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Energi Sumber Daya Minera menyerahkan kepada Pertamina Hulu Energi

3. Pengadaan barang dan jasa

PT Pertamina Persero melalui PT Pertamina Hulu Mahakam dalam menyambut alih kelola dari Total EP Indonesia harus membuktikan bahwa produksi minyak dan gas Mahakam akan terjaga dan bahkan lebih tinggi. Tantangan terbesarnya adalah nilai penurunan produksi, sehingga memerlukan lebih banyak pengerjaan sumur, pengembangan sumur-sumur dan biaya operasi yang lebih efisien. Pengeluaran untuk Program Mahakam 2018 diperkirakan US\$ 1,8 milyar. Untuk Operation Expenditure US\$ 1000 juta dan Capital Expenditure US\$ 700 juta.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- Blok Mahakam adalah ladang minyak dan gas yang masih memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah. Lebih dari 80% gas LNG Blok Mahakam disuplai ke Plant Bontang dan 36% pasokan gas domestic dari ladang gas Blok Mahakam.
- Blok Mahakam adalah ladang minyak dan gas dengan tingkat kesulitan tinggi. keunggulan operasional amat penting dalam pengelolaan Blok Mahakam. Sebab, cadangan minyak dan gas di sumur-sumur Blok Mahakam semakin menurun, operasinya juga makin rumit dan kompleks.
- Blok Mahakam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan migas Indonesia. Pendapatan migas dari Blok Mahakam masih di atas US\$ 1 Miliar. Bahkan pada tahun 2015 mencapai US\$ 2,5 Miliar dan tahun 2016 US\$ 1,8 miliar.
- Pemerintah meminta Total Indonesia EP untuk tetap memberikan dukungan terkait alih kelola agar level produksi setelah tahun 2017 dapat tetap terjaga oleh operator baru.
- Transfer of Mahakam Operatorship dan Tim Persiapan Pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam (TPPM) dibentuk masing-masing Total Indonesia EP dan Pertamina Hulu Energi agar tercipta koordinasi dan kominikasi yang baik, kelancaran & keamanan operasi, serta menjaga tingkat prodksi yang diharapkan
- Transfer Ketenagakerjaan disepakati bahwa 98% karyawan Total EP Indonesia beralih ke Pertamina Hulu Energi efektif 1 Januari 2018.
- 280 Pengadaan barang dan jasa melalui *tripartite sharing contract* untuk Pertamina Hulu Energi di tahun 2017 sudah dilaksanakan oleh Total EP Indonesia.

Rekomendasi

- Pertamina sebagai operator blok Mahakam sejak tanggal 1 Januari 2018 harus memperhatikan aspek *cost leadership* dalam pengelolaan blok tersebut. Ini penting untuk mencapai keunggulan operasional. Keunggulan operasional amat penting dalam pengelolaan Blok Mahakam. Sebab, cadangan minyak dan gas di sumur-sumur Blok Mahakam semakin menurun, operasinya juga makin rumit dan kompleks.
- Pertamina dalam hal ini Pertamina Hulu Energi harus membuktikan bahwa produksi minyak dan gas Mahakam akan terjaga dan bahkan lebih tinggi. Pertamina Hulu Energi harus melakukan inovasi dan terobosan untuk mengatasi penurunan produksi yang terjadi secara alamiah.